

---

## KEBIJAKAN MONETER MENURUT EKONOMI ISLAM DALAM MENGATASI PENYEBAB KRISIS MONETER

Febrianti Shakira<sup>1</sup>, Naila Haya Fauziah<sup>2</sup>, Syafira Okta Vionna Wirya<sup>3</sup>, Maryam Batubara<sup>4</sup>,  
[febrishakira93@gmail.com](mailto:febrishakira93@gmail.com)<sup>1</sup>, [fauziahnailahaia@gmail.com](mailto:fauziahnailahaia@gmail.com)<sup>2</sup>, [vionnawirya@gmail.com](mailto:vionnawirya@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[maryam.batubara@uinsu.ac.id](mailto:maryam.batubara@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

<sup>1),2),3),4)</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

### ABSTRAK

Krisis moneter saat ini menghadapi beberapa tantangan yang mempengaruhi nilai tukar mata uang dan stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter menurut perspektif Ekonomi Islam menerapkan prinsip dan tujuan yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Prinsip utama kebijakan moneter Islam adalah bebas dari riba, mendorong keadilan dan pemerataan, serta menjaga stabilitas nilai mata uang. Kebijakan moneter Islam memiliki tujuan utama yaitu untuk mencapai stabilitas ekonomi dan harga yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip utama kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam jurnal ini metode yang digunakan penulis yaitu dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data penelitian adalah melalui berbagai sumber seperti artikel penelitian-penelitian terdahulu, buku, dan juga internet (untuk memperoleh data sekunder). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Secara keseluruhan, kebijakan moneter Islam menawarkan alternatif sistem keuangan yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, upaya untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem ini patut dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Kebijakan Moneter

### ABSTRACT

*The current monetary crisis faces several challenges that affect currency exchange rates and economic stability. Monetary policy in Islamic economics has different principles and objectives from conventional economic systems. The main principles of Islamic monetary policy are to be free from usury, promote justice and equality, and maintain currency value stability. The main objective of Islamic monetary policy is to achieve economic stability and prices that are conducive to sustainable and fair economic growth. This journal aims to examine the principles of The main principles of monetary policy from an Islamic economic perspective. The author uses a qualitative approach method. The research data collection technique is through various sources such as previous research articles, books, and also the internet (to obtain secondary data). So it can be concluded that overall, Islamic monetary policy offers an alternative financial system that is more fair, stable and sustainable. Even though there are challenges in its implementation, efforts to continue developing and perfecting this system are*

---

*worth making in order to realize economic and social prosperity that is in line with Islamic values.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Monetary Policy*

## PENDAHULUAN

Krisis moneter saat ini menghadapi beberapa tantangan yang memengaruhi nilai tukar mata uang dan stabilitas ekonomi. Kondisi rupiah saat ini pada Juni 2024, kurs rupiah mencapai Rp 16.365 per USD setelah sebelumnya menyentuh level Rp 16.412 per USD. Faktor internal (seperti hasil rapat dewan gubernur Bank Indonesia) dan Faktor eksternal (menurunnya yield obligasi AS dan optimisme penurunan suku bunga oleh The Fed) mempengaruhi pelemahan rupiah. (Lestari, 2024)

Situasi perekonomian suatu negara ditentukan terutama oleh peran uang dalam perekonomian dan sistem moneter di mana negara tersebut beroperasi. Tentu saja hubungan antara uang dan ekonomi mempunyai efek yang sinergis. Peran uang dalam perekonomian mirip dengan aliran darah didalam tubuh manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa darah mengalir. Begitu pula jika situasi fiskal suatu negara terus-menerus tidak stabil, maka perekonomian negara tersebut akan stagnan atau bahkan mengalami krisis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa uang sangatlah penting dalam kehidupan perekonomian. Prasyarat terpenting bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat adalah sistem moneter yang baik. Sistem moneter yang baik mempengaruhi tingkat output secara keseluruhan dan peluang lapangan kerja penuh. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat produksi secara keseluruhan, kesempatan kerja, dan tingkat harga.

Tujuan utama kebijakan moneter adalah menciptakan nilai tukar yang stabil, sistem pembayaran yang stabil, sistem keuangan yang sehat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meninjau kembali krisis mata uang di Indonesia pada tahun 1997-1998, alasan utamanya adalah depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika yang sangat signifikan. Selain itu, ada faktor lain yang turut berkontribusi, yaitu: rezim nilai tukar devisa yang terlalu liberal dengan tidak adanya pengawasan yang memadai, devaluasi rupiah yang relatif kecil sehingga menilai rupiah secara keseluruhan terlalu tinggi, serta besarnya utang luar negeri swasta dengan jatuh tempo yang tidak diikuti dengan kebijakan fiskal dan moneter yang koheren dalam sistem nilai tukar, dengan bunga mencakup nilai tukar dan batasan intervensi, spekulasi asing

---

memainkan permainan yang disebut hedge fund, dan pemisahan mata uang dari sektor riil. Dengan kata lain, krisis nilai tukar rupiah pada saat itu dipicu oleh kombinasi faktor-faktor seperti kebijakan nilai tukar devisa yang terlalu longgar, penetapan nilai tukar yang tidak realistis, serta pengelolaan utang luar negeri yang kurang terkendali, yang pada akhirnya memicu depresiasi nilai tukar yang sangat tajam.

Setiap krisis ekonomi biasanya dimulai dengan sektor mata uang yang bermasalah. Berbagai permasalahan dalam aktivitas keuangan pada lembaga keuangan, seperti asimetri informasi, seringkali memberikan dampak negatif terhadap pasar keuangan. Mengingat berbagai faktor penyebab krisis keuangan di pasar keuangan dan pasar modal, pemerintah perlu memberikan perhatian serius dalam memulihkan stabilitas keuangan dalam kerangka otoritas keuangan. Kebijakan moneter merupakan elemen penting dalam perekonomian. Implementasinya sebenarnya bergantung pada sistem perekonomian yang dipilih. Pandangan ekonomi moneter pada sistem ekonomi konvensional tidak sama dengan pandangan pada sistem ekonomi Islam. Sistem moneter Islam bertujuan untuk mencapai keadilan dan utilitas serta menstabilkan siklus ekonomi. Sistem ekonomi moneter Islam memiliki mekanisme yang mencegah penumpukan uang, memperlancar aliran uang sebagai modal perusahaan, dan memungkinkan sektor riil berfungsi secara optimal. Larangan riba (bunga) dan maysir (spekulasi) merupakan pilar keuangan Islam dan aktivitas sektor keuangan. Uang bukanlah tujuan utama, melainkan hanya penggerak kegiatan perekonomian di sektor riil. (Irawan et al., 2023)

Di bawah ini adalah beberapa makalah penelitian sebelumnya yang membahas hal tersebut sebagai narasi ilmiah untuk perdebatan tersebut. Yang pertama adalah makalah Anita Rahmawati yang berjudul "Kebijakan Uang dan Moneter dalam Perspektif Islam." Dalam karyanya, Ibnu Khaldun mengatakan, "Negara tanpa keadilan dalam sistemnya tidak akan bisa mencapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kehadiran uang dalam perekonomian menjadi penting karena tidak adil." Kemunduran alat ukur yang disebabkan oleh ketidakstabilan nilai tukar mata uang menyebabkan perekonomian tidak beroperasi pada titik ekuilibrium. Hal ini akan mempersulit tercapainya keadilan dalam bidang ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan moneter dilaksanakan sedemikian rupa sehingga fungsi uang terjamin dan perekonomian berada dalam keadaan yang memungkinkan terjadinya pemerataan

---

sumber daya, pemerataan pendapatan, pertumbuhan optimal, lapangan kerja penuh, dan stabilitas perekonomian mampu menciptakan stabilitas harga. (Rahmawaty, 2013)

Artikel kedua ditulis oleh Shri Ayu Andari Putri Alwaris dan Nugraha Hasan dengan judul “Mengadopsi Nilai-nilai Islam dalam Instrumen Kebijakan Moneter untuk Pengendalian Peredaran Moneter.” Pasal tersebut menyebutkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam instrumen kebijakan moneter dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mencapai tujuan perekonomian berkelanjutan dengan tetap konsisten dengan prinsip syariah. Penerapan pendekatan kebijakan moneter yang efektif dan menghormati prinsip-prinsip Islam dapat mendukung stabilitas dan kesejahteraan perekonomian yang berkelanjutan. (Alwaris & Hasan, 2023).

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kebijakan

Secara etimologis, istilah ‘politik’ berasal dari bahasa Yunani ‘polis’ yang berarti ‘negara’ atau ‘kota’. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi ‘politia’ yang memiliki arti ‘negara’. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, istilah ‘politia’ menjadi “*policy*” yang mengacu pada pengelolaan urusan dan administrasi publik. Dengan demikian, istilah “kebijakan” (*policy*) mengacu pada tindakan atau kumpulan tindakan yang dilakukan oleh aktor tertentu, seperti pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintah, dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep politik dan kebijakan publik (*public policy*) memiliki keterkaitan yang erat, dimana kebijakan publik merupakan wujud dari pengelolaan urusan-urusan publik oleh aktor-aktor politik. Secara konseptual, para ahli mempunyai pandangan berbeda mengenai politik. Namun biasanya “kebijakan” adalah serangkaian keputusan pemerintah yang memandu tindakan untuk mengatasi suatu masalah atau tantangan. Ini mencakup tujuan, rencana, keputusan, solusi, kegiatan dan program yang dilaksanakan. Menurut Uhlau dan Prewitt yang diambil oleh Jones, politik adalah tentang keputusan permanen dan ditandai dengan tindakan yang konsisten dan berulang-ulang dari orang yang membuat keputusan dan orang yang mengikuti keputusan tersebut.

Politik selalu menjadi sumber kontroversi, dan pertanyaan selalu muncul, baik itu kebijakan pemerintah, dunia usaha, lembaga pemerintah, maupun organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan nirlaba pada umumnya. Selalu aktif mendiskusikan kebijakan, baik internal

---

maupun eksternal. Kebijakan mencakup tindakan dan niat, serta mencakup tindakan dan kelambanan. Politik adalah serangkaian tindakan yang ditargetkan. Kebijakan mempengaruhi masa depan. Kebijakan juga mengacu pada serangkaian kegiatan yang dihasilkan dari proses yang berkaitan dengan hubungan organisasi. Politik juga mencakup peran aktor politik.

Secara operasional, arahan ini dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Ringkasan peraturan.
- 2) Bersifat pedoman, pedoman, atau petunjuk untuk mencapai pemahaman tentang tujuan, cara, dan/atau cara.
- 3) Segala usaha dan kegiatan sekelompok orang yang terorganisir.
- 4) Menjamin bahwa tindakan terpadu bergerak secara dinamis dalam arah dan ritme yang sama untuk mencapai tujuan bersama yang spesifik. (Nur & Guntur, 2019)

## 2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter atau kebijakan fiskal ialah kebijakan nasional yang menetapkan peraturan dan tindakan di bidang keuangan pemerintah. Kebijakan moneter didefinisikan lebih khusus sebagai tindakan makroekonomi pemerintah yang mempengaruhi penciptaan dan peredaran uang di masyarakat. Dalam proses ini, pemerintah dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar, yang selanjutnya akan berdampak kepada investasi modal. Dampak tersebut kemudian dapat mempengaruhi permintaan agregat dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi tingkat harga. Dengan kata lain, melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat menciptakan situasi ekonomi yang lebih menguntungkan. Hal ini dilakukan dengan mengatur jumlah uang yang beredar, yang akan berdampak pada investasi, permintaan agregat, dan pada akhirnya juga pada tingkat harga atau inflasi (Wahyudi, 2013). Kebijakan moneter merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter untuk mengendalikan dan mengarahkan kondisi makroekonomi suatu negara ke arah yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Kondisi makroekonomi yang lebih baik dalam konteks ini memiliki dua indikator utama:

1. Peningkatan tingkat produksi dan perbaikan neraca perekonomian secara keseluruhan. Dengan kata lain, terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. Terjaganya stabilitas harga, atau dengan kata lain, laju inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang terkendali.

Jadi, melalui kebijakan moneter, pemerintah atau otoritas moneter berupaya untuk mencapai target-target makroekonomi yang lebih baik, seperti pertumbuhan ekonomi yang pesat dan inflasi yang terkendali, dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Upaya ini dilakukan agar kondisi perekonomian secara keseluruhan dapat mencapai situasi yang lebih ideal dan menguntungkan bagi masyarakat. (Ajuna, 2017)

Tujuan kebijakan keuangan Islam, yang merupakan bagian dari ekonomi syariah, bertujuan untuk memajukan keseimbangan dan kemakmuran (Iqama al-Adl) dengan menjamin keadilan dan kemaslahatan (Jalb al-Maslah) di semua bidang kehidupan manusia. Dengan kata lain, kepentingan umum terletak pada pemerintah yang bersangkutan. Saya tidak terlalu tertarik. Melihat situasi sekarang saat ini, kebijakan moneter menjadi faktor penting yang dapat mengganggu stabilitas sistem makroekonomi. Stabilitas perekonomian dapat dicapai melalui kebijakan moneter yang sehat, dimana mekanisme kebijakan moneter yang efektif dapat menyampaikan informasi yang akurat mengenai harga dan produksi. Sebaliknya, bentuk kebijakan moneter yang tidak stabil dapat memperburuk masalah inflasi. Dengan kata lain, kebijakan moneter memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Kebijakan moneter yang tepat dan efektif dapat mendorong stabilitas, sedangkan kebijakan moneter yang tidak stabil justru dapat memperparah permasalahan inflasi dalam perekonomian. (Putri & Nasution, 2022)

### 3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam diartikan sebagai suatu perilaku atau sistem perekonomian yang berkaitan dengan kaidah ajaran Islam. Aturan Islam sendiri bersumber dari Alquran dan al-Hadist. Oleh sebab itu, dalam penerapan aturan-aturan tersebut, umat Islam menganggapnya sebagai petunjuk, tuntunan, dan pedoman dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berfondasi pada prinsip dan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits, yang kemudian dijadikan sebagai panduan dan acuan dalam aktivitas ekonomi. (Jajang et al., 2021)

Menurut Bapak S.M. Hasanuzzaman: “Ekonomi Islam mengacu pada pencarian berbagai jenis sumber daya untuk memberikan kepuasan fisik dan mental (kepuasan) dan memungkinkan mereka untuk memenuhi semua kewajiban mereka kepada Tuhan, yang merupakan pengetahuan dan penerapan ajaran dan aturan syariah untuk mencegah ketidakadilan. Di sisi

---

lain, Coric dan masyarakat. Manan: "Ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi suatu masyarakat dengan nilai-nilai Islam." Hal ini berbeda dengan Khurshid Ahmad yang menjelaskan: perspektif Islam. Di sisi lain, Mr. M.N. Siddiqui mengatakan, "Ekonomi Islam adalah respon para pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi kehidupan. Sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah, serta akal dan pengalaman." mendefinisikan ekonomi Islam sebagai tujuan mencapai kemanusiaan.

Ekonomi Islam hanyalah sebuah upaya untuk merumuskan ekonomi yang manusiawi dan berorientasi sosial yang menolak individualisme berlebihan dari ilmu ekonomi klasik. "Munawar Iqbal menekankan bahwa "Ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang mewakili ekonomi Islam." Dari Dalam perspektif hukum Islam, wahyu dianggap sebagai sumber utama ilmu pengetahuan dan teknologi (Mambaul Ilmi). Al-Quran dan Al-Hadits kemudian dijadikan bahan referensi untuk mengevaluasi teori-teori baru berdasarkan ajaran ekonomi Islam". (Fahmi, 2019)

#### 4. Krisis Moneter

Pengertian krisis moneter adalah menurunnya perekonomian suatu negara yang menyebabkan turunnya harga aset secara tajam. Selain itu, krisis keuangan dapat membuat masyarakat tidak mampu membayar utangnya dan sektor perbankan kekurangan likuiditas. Krisis keuangan pasti membuat masyarakat panik, sehingga mereka lari menjual aset dan menarik uang dari rekening tabungan. Hal ini mencegah risiko kerugian akibat terus menurunnya harga aset selama aset tersebut dimiliki. Tindakan tersebut kemudian berdampak negatif pada pasar saham, pemerintah dan menyebabkan krisis mata uang. (Hasbi et al., 2024)

Para ekonom sepakat bahwa ciri-ciri negara rawan krisis keuangan adalah:

- a. Mempunyai hutang luar negeri dengan jumlah cukup besar;
- b. Inflasi yang tidak terkendali;
- c. Defisit neraca pembayaran yang besar.
- d. Nilai tukar yang tidak seimbang.
- e. Bunganya lebih tinggi dari kewajaran.

Jika suatu negara memiliki ciri-ciri tersebut, maka dapat dipastikan negara tersebut tinggal menunggu krisis ekonomi. (Anwar, 2022)

---

Krisis keuangan merupakan permasalahan yang mempunyai dampak besar terhadap pemerintahan, masyarakat dan perbankan. Krisis keuangan dapat menimbulkan banyak dampak, antara lain:

a. Kebangkrutan perusahaan

Akibat krisis keuangan, banyak perusahaan yang bangkrut karena tidak mampu membayar utangnya dan kekurangan bahan baku impor. Pasalnya, krisis mata uang merupakan kondisi yang memaksa perusahaan membeli bahan baku dalam mata uang asing saat nilai rupee turun. Secara tidak langsung, hal ini mendorong perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja sehingga kemiskinan meningkat.

b. Bank mengalami krisis keuangan

Depresiasi rupiah juga berdampak pada bank yang memiliki riwayat kredit buruk yang berujung pada kegagalan bisnis dan utang. Hal ini jelas merugikan masyarakat karena bank telah kehilangan perannya sebagai penyimpan uang yang aman.

c. Kerusakan nasional yang berkelanjutan

Krisis ekonomi yang semakin serius memicu keresahan politik dan memicu protes massal. Hal ini seringkali dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya korban yang tidak bersalah. Demikian informasi mengenai pengertian krisis keuangan, penyebab dan dampaknya terhadap pemerintah dan masyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa krisis mata uang merupakan prasyarat terjadinya resesi ekonomi, yang biasanya ditandai dengan depresiasi rupee dan peningkatan utang pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan diversifikasi agar aset Anda tidak hanya tertahan pada satu jenis investasi saja. (Hasbi et al., 2024)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian adalah melalui berbagai sumber seperti artikel penelitian-penelitian terdahulu, buku, dan juga internet (untuk memperoleh data sekunder). Analisis literatur dan referensi pustaka akan memberikan pemahaman teoretis yang kuat tentang kebijakan moneter menurut ekonomi islam dalam mengatasi krisis moneter, sedangkan sumber-sumber internet akan memberikan informasi aktual terkini. Data sekunder ini akan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif tentang kondisi kebijakan moneter saat ini.

---

Melalui pendekatan kualitatif dan pengumpulan data sekunder, penelitian ini diharapkan mampu menggali perspektif yang beragam dan mengidentifikasi tren serta hubungan yang berguna untuk mengembangkan wawasan baru. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman kita tentang kebijakan moneter menurut ekonomi islam dalam mengatasi krisis moneter, dengan menggunakan data sekunder yang handal dan beragam sumber referensi. Jadi, ringkasnya penelitian ini dapat menjadi referensi yang berharga dan berguna untuk berbagai pihak agar dapat mengembangkan ekonomi moneter yang berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tujuan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam

Untuk mencapai atau memastikan berfungsinya sistem moneter, otoritas moneter biasanya memantau sistem secara keseluruhan. Karena uang tidak bisa dengan mudah menutupinya. Sektor keuangan merupakan jaringan yang penting dan memiliki pengaruh terhadap sektor riil dalam perekonomian. Kebijakan moneter adalah instrumen kebijakan publik yang sangat penting dalam sistem perekonomian secara keseluruhan. Dengan kata lain, sektor keuangan dan instrumen kebijakan moneter merupakan komponen-komponen penting yang saling terkait dan mempengaruhi dinamika sistem perekonomian suatu negara. Bank sentral, juga dikenal sebagai Bank Indonesia, bertujuan untuk mencapai dan menjamin stabilitas mata uang Rupiah. (Wahyudi, 2013)

Tujuan tersebut tertuang dalam UU No. Pada tanggal 23 tahun 1999, bank sentral menyatakan: Kemudian diganti dengan Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2009. Ada dua aspek dalam stabilitas rupiah. Artinya, aspek pertama dari stabilitas Rupiah: stabilitas harga komoditas melalui pembangunan. Hal ini disebabkan oleh tingkat inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu penciptaan berbagai produk keuangan, menjaga likuiditas, meningkatkan transparansi sistem keuangan dan menciptakan mekanisme pasar yang efisien untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendukung negara. ekonomi. pertumbuhan.

Stabilitas nilai uang tidak terlepas dari tujuan untuk memelihara kejujuran dan keterbukaan dalam hubungan dengan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan moneter Islam

---

bertujuan untuk mewujudkan stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui beberapa cara yang sesuai dengan prinsip kejujuran dan transparansi. Kebijakan moneter dalam perekonomian Islam memiliki tujuan lain sebagai berikut:

- Kemakmuran ekonomi dengan kesempatan kerja penuh Di sini yang dimaksud dengan kemakmuran ekonomi adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar manusia dari segi materiil dan moral, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesulitan hidup.
- Keadilan Sosial Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Ada dua elemen untuk memahami konsep ini. (a) Bentuk keseimbangan dan perbandingan antar pemegang hak. (b) Hak-hak perseorangan harus diberikan dan diwariskan kepada mereka yang memerlukan.
- Kestabilan nilai uang memainkan peran penting dalam perekonomian, dan pengelolaan mata uang syariah harus dilakukan dengan memperhatikan stabilitas nilai uang sebagai prioritas utama. (Abdianti et al., 2023)

## 2. Perbedaan Pandangan Ekonomi Islam dan Konvensional Terhadap Ekonomi Moneter

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem moneter berfokus pada penggunaan uang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, tidak sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan. Ekonomi Islam melarang riba (bunga) dalam semua transaksi keuangan, termasuk pemberian kredit dan pinjaman. Sistem moneter Islam menekankan pada penggunaan uang untuk memfasilitasi transaksi riil, bukan untuk spekulasi. Selain itu, ekonomi Islam mendorong penggunaan instrumen keuangan syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), dan ijarah (sewa) untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif.

Sebaliknya, sistem moneter konvensional memandang uang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan melalui bunga. Sistem ini mengizinkan transaksi berbasis bunga, baik dalam pemberian pinjaman maupun simpanan. Selain itu, sistem moneter konvensional umumnya lebih terfokus pada stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan pengaturan jumlah uang yang beredar sebagai tujuan utamanya.

Perbedaan mendasar ini berdampak pada perilaku dan kebijakan moneter yang diterapkan oleh masing-masing sistem ekonomi. Ekonomi Islam lebih menekankan pada kestabilan nilai uang, keadilan, dan pembangunan ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah,

---

sementara ekonomi konvensional lebih berorientasi pada pencapaian target makroekonomi melalui instrumen-instrumen moneter yang tersedia.

### 3. Penyebab Krisis Moneter

Penyebab utama krisis ini adalah tingginya tingkat utang luar negeri swasta, dan bukan lemahnya fundamental perekonomian Indonesia, seperti yang terlihat pada data statistik di atas. Permasalahan utama dari krisis yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh melemahnya sektor rupiah dalam negeri, melainkan oleh kondisi sektor eksternal khususnya dolar AS yang melebihi atau menjauh dari nilainya saat ini. Jika dolar AS tidak melemah, perekonomian Indonesia tidak akan terjerumus ke dalam krisis meskipun banyak terjadi distorsi pada tingkat mikroekonomi. Jadi, kondisi fundamental ekonomi mikro yang telah membaik belum cukup untuk menghindarkan terjadinya krisis jika terjadi serangan lagi terhadap nilai tukar rupiah, karena keterbatasan cadangan devisa yang dimiliki. Krisis ini diperburuk oleh serangkaian penyebab lainnya. Analisis faktor penyebab penting dilakukan, karena kesembuhan jelas bergantung pada keakuratan diagnosis. (Tarmidi, 2003)

Jadi, inti permasalahan krisis yang berkepanjangan ini terletak pada depresiasi nilai tukar rupiah yang sangat signifikan terhadap dolar AS. Namun, penurunan nilai tukar ini bukan merupakan satu-satunya penyebab terjadinya krisis moneter, melainkan ada faktor-faktor lain yang juga turut berkontribusi. Tetapi masih ada banyak faktor lainnya yang menyebabkan krisis moneter tergantung pandangan masing-masing setiap pengamat. Berikut hal yang menyebabkan terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan.

1. Liberalisasi keuangan yang dilakukan terlalu cepat tanpa dibarengi dengan pengawasan dan regulasi yang memadai. Hal ini membuka peluang bagi aliran modal jangka pendek yang bersifat spekulatif untuk masuk dan keluar dengan cepat, sehingga menciptakan volatilitas yang tinggi di pasar keuangan.
2. Lemahnya tata kelola perusahaan (corporate governance) di banyak negara, yang memicu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Faktor keempat adalah meningkatnya sentimen negatif investor global terhadap prospek ekonomi negara-negara yang terkena krisis. Hal ini memicu aksi jual besar-besaran aset-aset di negara-negara tersebut, sehingga membuat nilai tukar mata uang lokal anjlok dan memicu krisis yang berkepanjangan. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut akhirnya

menyebabkan terjadinya krisis moneter yang berdampak besar pada stabilitas perekonomian di banyak negara.

## 5. Mekanisme Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Permasalahan Moneter

Ekonomi Islam memiliki mekanisme yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan moneter. Hal ini menjadi pelajaran penting ketika menghadapi permasalahan, termasuk permasalahan ekonomi. Artinya permasalahan tidak boleh diselesaikan hanya dengan satu metode/pendekatan/metode saja, namun banyak metode/pendekatan/metode yang harus dipadukan agar mempunyai peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Beberapa pendekatan/metode yang bisa dilakukan sebagai solusi masalah ekonomi khususnya disaat krisis sebagai substitusi dan komplementer utang adalah :

### 1. Meminta Bantuan Negara Lain Dengan Melakukan Pertukaran

Strategi Nabi Ya'qub untuk menghadapi krisis pangan di negaranya yaitu dengan meminta bantuan negara lain dengan melakukan pertukaran barang-barang yang dipunyai dengan barang yang dibutuhkan, prinsip barter/pertukaran itu bisa juga dengan menggunakan mata uang sebagai alat tukar.

### 2. Menghilangkan Riba

Sebagaimana dalam pendahuluan telah dijelaskan bahwa utang dengan menetapkan bunga bukan menyelesaikan masalah justru dengan tambahan bunga semakin menambah masalah. Menghapuskan sistem riba menjadi satu keharusan. Basis bunga harus digantikan dengan basis mudharabah atau usaha bersama atau kerjasama yang berdasarkan prinsip bagi hasil yang adil diantara semua pihak. Apalagi islam telah melarang segala bentuk riba, oleh karenanya ia harus dihapuskan dalam sistem perekonomian.

### 3. Zakat

Zakat merupakan jembatan yang mengantarkan umat muslim menuju kesejahteraan dan kejayaan. Dengan zakat dapat memajukan perekonomian bangsa dan mensejahterakan umat. Zakat memiliki 3 peran antara lain pemberantasan kemiskinan, stabilitas ekonomi dan pembangunan ekonomi. Zakat memberantas kemiskinan karena dengan zakat yang disalurkan kepada orang fakir miskin maka taraf hidupnya akan naik begitu juga daya belinya sehingga tidak miskin lagi dan mampu memenuhi

kebutuhannya namun tidak bisa terus menerus dibantu oleh zakat perlu aksi lain yaitu menyiapkan lapangan pekerjaan sehingga orang fakir miskin yang masih bisa bekerja harus bekerja sesuai dengan kapasitasnya yang akan dijelaskan di point berikutnya. Zakat juga menstabilkan perekonomian, karena kesenjangan sosial ekonomi antara kaya dan miskin dapat diminimalisir, adanya distribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin membuat ekonomi semakin stabil.

#### 4. Kewajiban Bekerja

Selain zakat, kewajiban bekerja juga jadi kunci untuk mengurangi angka kemiskinan. Setiap muslim diharuskan untuk bekerja. Selain sebagai ikhtiar untuk mendapatkan rezeki, bekerja juga menjadi solusi dalam masalah ekonomi. Sesungguhnya Allah telah berjanji akan menyediakan makanan bagi seluruh makhluk-Nya. Namun janji tersebut tidak dapat dipenuhi dengan “cek kosong”. Seseorang akan mampu mencari nafkah bila rela merantau dan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Karena Allah menciptakan bumi dan segala isinya untuk kesejahteraan umat manusia. Barangsiapa mau berusaha dan bekerja maka ia akan mendapat rezeki dan keberkahan dari Allah. Seseorang yang berusaha keras akan mampu mengubah nasibnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. (Kurniawan et al., 2022)

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari pembahasan penulisan menarik kesimpulan, Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan moneter harus diarahkan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan dalam perekonomian.

Sistem moneter Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem moneter konvensional. Prinsip utama dalam sistem moneter Islam adalah larangan riba (bunga) dan maysir (spekulasi), serta mendorong perputaran uang untuk membiayai sektor riil. Instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam Islam diarahkan untuk menciptakan stabilitas harga, nilai tukar, dan mendorong keadilan sosial-ekonomi.

Penerapan kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki potensi yang besar untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

dan sejalan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, upaya pengembangan sistem moneter yang berlandaskan pada ekonomi Islam perlu terus dilakukan dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan.

## Saran

Penulis mengakui bahwa pembahasan yang disajikan dalam jurnal ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Namun jurnal ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Bagi regulator keuangan dan keuangan, hasil penelitian ini mungkin berguna dalam merumuskan kebijakan dan instrumen moneter yang konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah. Upaya seperti pengembangan produk dan pasar keuangan syariah serta penguatan sinergi antara sektor keuangan dan riil perlu terus dioptimalkan.

Dengan adanya saran dan masukan dari berbagai pihak, diharapkan jurnal selanjutnya dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif untuk mengoptimalkan peran kebijakan moneter dalam mendukung pembangunan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jurnal ini dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti di masa depan dalam upaya memperkaya kajian mengenai ekonomi dan keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdianti, D., Restu, A., Al ayyubi, S., & Hidayat, F. (2023). Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnl Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 219–220. <https://doi.org/10.59603/cuan.v1i2.20>
- Ajuna, L. H. (2017). Kebijakan Moneter Syariah. *Al-Buhuts*, 13(1), 104–117. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/view/13778>
- Alwaris, S. A. A. P., & Hasan, N. (2023). Adopsi Nilai-Nilai Islam pada Instrumen Kebijakan Moneter dalam Mengontrol Peredaran Uang. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 65–77. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.601>
- Anwar, S. (2022). *Pengantar Kebanksentralan*. CV. Green Publisher Indonesia.
- Fahmi, N. (2019). Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 3. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.175>

- Hasbi, I., Arifin, A. H., Akbar, H. A., Damanik, D., Runtunuwu, P. C. H., Peranginangin, A. M., Bhegawati, D. A. S., Zulaikah, Purba, M. L., Iswadi, U., Riswanto, A., Hayati, T. P. T. N., & Eka, A. P. B. (2024). *Ekonomi Moneter*. Wiyata Bestari Samasta.
- Irawan, H., Permata, S., Ramdani, E. A., Jastacia, B., Utama, S., Adbuh, A., Aslamah, A. N., Zaroni, A. N., Shofawati, A., Mustika, M., & Kurlillah, A. (2023). *Ekonomi Moneter Islam*. In *Az-Zahra Media Society* (Vol. 3, Issue 1).
- Jajang, A., Mahri, W., Cupian, |, Nur, M., Al Arif, R., Arundina, T., & Widiastuti, T. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Kurniawan, R. R., Putri, T. D., & Sufni, A. Z. (2022). Ragam Solusi Ekonomi Islam untuk Mengatasi Masalah Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 2(2), 168–170. <https://osf.io/download/636db9df30bbfc0afe27f5f6/>
- Lestari, A. H. (2024). Kondisi Rupiah Kini Dibandingkan Krisis 1998, 2008, dan 2020. *Medcom.Id*. <https://www.medcom.id/ekonomi/analisis/4KZMIJgk-kondisi-rupiah-kini-dibandingkan-krisis-1998-2008-dan-2020>
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik* (Issue April). Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar. [https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992\\_ANALISIS\\_KEBIJAKAN\\_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf)
- Putri, I. A., & Nasution, E. O. A. (2022). Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 166. <https://doi.org/10.30821/se.v8i1.13778>
- Rahmawaty, A. (2013). Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Equilibrium*, 1(2), 181–199. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/213/pdf>
- Tarmidi, L. T. (2003). Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran Imf Dan Saran. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 1(4), 3. <https://doi.org/10.21098/bemp.v1i4.183>
- Wahyudi, A. (2013). Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam. *Justicia Islamica*, 10(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.142>

